

Hubungan Interdependensi Indonesia-China di Tengah Ketegangan Laut Natuna Utara

Ahmad Naufal Farras
Universitas Indonesia

Abstract

Relations between Indonesia and China have existed for more than 70 years. Throughout the history of relations between the two countries, there have been ups and downs. In 1967 Indonesia suspended diplomatic relations with China. It took Indonesia 23 years to re-open diplomatic relations with China. Furthermore, Indonesia and China began to build a more cooperative relationship. However, in 2009 tensions resurfaced after China claimed unilaterally that the North Natuna Sea was part of China based on their historical maps. Interestingly, even though there were territorial disputes, Indonesia and China continued to cooperate. This study aims to analyze the reasons why Indonesia has continued to maintain cooperative relations with China until now, even though Indonesia is in an unfavorable position in the dispute over the North Natuna Sea area. This study uses the theory of interdependence by Nye which is then analyzed using qualitative research methods. This article argues that the mechanism of economic cooperation will increase the common security and stability in the region.

Keywords: *Indonesia; China; North Natuna Sea; interdependence; economic cooperation*

Abstrak

Hubungan Indonesia dan China sudah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Selama hubungan kedua negara berlangsung kerap mengalami pasang surut. Pada tahun 1967 Indonesia melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan China. Indonesia membutuhkan waktu 23 tahun untuk kembali membuka hubungan diplomatik dengan China. Selanjutnya, Indonesia dan China mulai membangun hubungan yang lebih bersifat kerjasama. Namun di tahun 2009 ketegangan muncul kembali setelah China mengklaim secara sepihak bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian dari China berdasarkan peta sejarah mereka. Menariknya meski terjadi konflik sengketa wilayah, Indonesia dan China tetap melakukan kerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa Indonesia tetap melakukan hubungan kerjasama dengan China hingga sekarang padahal Indonesia berada di posisi yang tidak menguntungkan dalam isu sengketa wilayah Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan teori interdependensi oleh Nye yang kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Argumen utama dalam tulisan ini adalah dengan mekanisme kerjasama ekonomi akan meningkatkan keamanan bersama dan stabilitas kawasan.

Kata-kata kunci: *Indonesia; China; Laut Natuna Utara; interdependensi; kerjasama ekonomi*

Pendahuluan

Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah di dunia yang menjadi panggung konflik kepentingan oleh berbagai negara, tidak hanya negara yang berada disekitarnya melainkan negara di luar kewasannya kerap terlibat. Konflik ini merupakan isu kemanan regional yang hingga saat ini belum menemukan titik temu penyelesaian. Konflik yang terjadi di Laut China Selatan berawal dari negara China yang secara sepihak mengklaim luas wilayah perairan hingga mencakup wilayah Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan bahkan Taiwan. Klaim sepihak China atas Laut China Selatan pertama kali terjadi pada tahun 1947. China yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah LCS dengan menerbitkan peta yang memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah perairan tersebut (Ruyat, 2017). Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2000-an, China meningkatkan berbagai tindakannya dalam mengasosiasikan wilayah Laut China Selatan. Berbagai upaya melalui diplomasi, administrasi dan juga militer dilakukan oleh China untuk mempertahankan yurisdiksi perairan menurut China (Fravel, 2011). *China Marine Surveillance* (CMS) yang semula dikirimkan ke wilayah Laut China Timur, kemudian pada tahun 2007 CMS dikirimkan ke wilayah Laut China Selatan. CMS ditugaskan untuk melakukan patroli secara reguler dan perlindungan wilayah Laut China Selatan mulai dari utara hingga selatan pada wilayah yang disengketakan (Chubb, 2014). Selanjutnya di tahun 2007 dan 2008, China dengan tegas memperingatkan perusahaan energi Vietnam untuk menangguk kegiatan pengeboran minyak di kawasan Laut China Selatan, dan juga melaksanakan aktivitas angkatan laut di kepulauan Paracel yang merupakan wilayah yang dikaim oleh Vietnam (Chwee, 2017).

Beberapa analis berpendapat bahwa alasan terjadinya sebuah konflik di Laut China Selatan didasari oleh kepentingan ekonomi. Alasan tersebut seringkali menjadi referensi penyebab utama wilayah Laut China Selatan diperebutkan. Kekayaan sumber daya alam yaitu gas alam dan cadangan minyak bumi menjadi nilai ekonomis. Menurut *Council for Foreign Policy*, Laut China Selatan memiliki kekayaan gas alam sekitar 900 triliun kaki kubik. Kemudian, kandungan cadangan minyak bumi sebanyak 7,7 miliar barel. Selain itu, negara-negara yang berada disekitar Laut China Selatan memperebutkan wilayah tersebut karena nilai strategis yang dimilikinya. Laut China Selatan menjadi *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga membuat wilayah Laut China Selatan menjadi wilayah tersibuk di dunia. Hampir seluruh perdagangan dunia melalui jalur tersebut (Utomo, et al., 2017).

Dalam perkembangannya, konflik wilayah Laut China Selatan menyeret Indonesia masuk ke dalam sengketa wilayah. Tahun 2009, negeri

“Tirai Bambu” kembali menerbitkan peta terbaru mengenai klaimnya di wilayah Laut China Selatan. Permasalahan baru muncul setelah China menerbitkan peta terbarunya yang memberi dampak bagi Indonesia. Awalnya pulau Sparty dan Paracel saja yang menjadi permasalahan, namun berimbas pula pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Ruyat, 2017). China ditengarai memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ke dalam peta wilayahnya pada tahun 2009. Mantan Panglima TNI Moeldoko menuduh China secara unilateral mengubah peta wilayahnya yang sebelumnya tidak ada Indonesia disana (Poespojoedho, 2019).

Meski Indonesia mendapat imbas dari klaim sepihak oleh China terkait wilayah Laut China Selatan, yaitu adanya tumpang tindih wilayah Laut Natuna Utara. Namun, menariknya adalah setelah munculnya sengketa tersebut Indonesia justru semakin meningkatkan kerjasama dengan China. Padahal di lain sisi, Indonesia merupakan negara yang dirugikan atas klaim sepihak China. Mengingat bahwa potensi sumber daya alam di wilayah tersebut sangat melimpah. China memasukan wilayah Indonesia ke dalam peta yang diterbitkan pada tahun 2009. Merujuk pada fenomena tersebut maka menarik untuk dianalisa mengenai alasan mengapa Indonesia meningkatkan kerjasama dengan China pasca sengketa di wilayah Laut Natuna Utara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggambarkan berbagai perspektif dalam melihat bagaimana respon Indonesia terhadap sengketa wilayah di Laut Natuna Utara. Meyer *et al.* (2019) menulis tentang sekuritisasi yang ditujukan kepada klaim China atas Laut Natuna Utara. Menurutnya, setelah puluhan tahun berlalu menjadi negara yang netral dalam isu sengketa Laut China Selatan, akhirnya Jakarta merasa untuk tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara pasca klaim sepihak oleh China. Meyer *et al.* (2019) menggunakan konsep sekuritisasi yang dikembangkan oleh *Copenhagen School*. Konsep sekuritisasi digunakan untuk mengungkap bahwa Jakarta dengan cepat melakukan sekuritisasi pada isu Laut Natuna Utara antara tahun 2014 dan 2016. Artikel tersebut menjelaskan bagaimana Jakarta berhasil melakukan sekuritisasi pada isu klaim China yang memiliki sejarah hak penangkapan ikan di wilayah perairan Natuna Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2014 isu Laut Natuna Utara dibahas di media hampir secara eksklusif dalam hal budaya, sosial, dan ekonomi yang kemudian menyajikan bahwa klaim teritorial China merupakan sebuah ancaman di tahun 2015. Pada akhirnya, di tahun 2016, media arus utama Indonesia secara ekplisit membingkai klaim China merupakan sebuah ancaman bagi integritas teritorial Indonesia (Meyer, et al., 2019).

Konsep sekuritisasi juga dikemukakan oleh Muhaimin (2018) yang mencoba melihat sejauh mana pembaharuan dalam penamaan Laut Natuna

Utara di sebelah utara Pulau Natuna merupakan kebijakan sekuritisasi upaya Pemerintah Indonesia menjaga kepentingan nasional dari ancaman eksternal. Sebelumnya perairan tersebut merupakan wilayah yang masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan. Dalam artikel Muhaimin (2018) mengungkapkan bahwa penamaan Laut Natuna Utara, dalam studi keamanan dan hubungan internasional, dapat dipahami sebagai langkah sekuritisasi Indonesia terhadap kedaulatan wilayah maritimnya. Upaya sekuritisasi itu dapat dilihat pada proses panjang pembentukan peta baru yang melibatkan seluruh sumber daya nasional serta pernyataan-pernyataan diplomatik pemerintah Indonesia (*speech act*). Upaya sekuritisasi juga dapat dilihat dari pembentukan peta baru 2017 sebagai satu kesatuan dengan proses panjang pembentukan peta Indonesia yang sudah dimulai sejak 1957 melalui Deklarasi Djuanda. Bahwa upaya menjaga kedaulatan maritim Indonesia sudah diupayakan sejak saat itu, hingga akhirnya diakomodasi menjadi UNCLOS pada tahun 1982, dan Indonesia meratifikasinya pada tahun 1996. Upaya sekuritisasi ini dilihat juga berdasarkan visi besar Presiden Joko Widodo membangkitkan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang tertuang dalam visi Nawa Cita (Muhaimin, 2018).

Menurut Deni dan Sahri (2017) dalam perspektif Indonesia, klaim China atas Laut Natuna Utara dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri dan hubungan baik antara Indonesia dan China yang telah lama terjalin. Menanggapi klaim China atas ZEE Indonesia tersebut, Indonesia menggunakan jalur diplomasi preventif guna mencegah meluasnya konflik karena Indonesia tidak akan mampu menghadapi China secara militer. Selain itu, Pemerintah Indonesia terus melakukan dialog informal dengan China dalam menyikapi tumpang tindih ZEE Indonesia yang diklaim oleh China. Sampai saat ini, Indonesia tidak melakukan dialog secara formal dengan China terkait Laut China Selatan sebab jika Indonesia melakukannya, akan menjadikan Indonesia secara tidak langsung mengakui adanya klaim China di Laut China Selatan. Hingga penelitian ini ditulis, dialog tersebut masih berjalan. Dalam artikel Deni dan Sahri (2017) juga dijelaskan bahwa masuknya ZEE Indonesia di Natuna ke dalam wilayah Laut China Selatan membuat Indonesia tidak berdiam diri. Bahkan, Presiden Joko Widodo terbang langsung ke Natuna dan mengadakan rapat di atas kapal perang sebagai respon atas insiden yang terjadi di Natuna. Ini merupakan sinyal bagi China untuk tidak mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna yang memang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Di bawah Presiden Joko Widodo, Indonesia mengeluarkan diplomasi poros maritim sebagai upaya menjaga keutuhan wilayah laut Indonesia, khususnya ZEE Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Selain itu, demi menjaga kedaulatan wilayah ZEE Indonesia

serta untuk menjaga hubungan baik dengan China yang merupakan mitra dagang Indonesia, Indonesia perlu memainkan peran strategis ini dengan baik (Deni & Sahri, 2017).

Adikara dan Munandar (2021) menulis tentang kebijakan Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara. Dalam artikelnya, mereka menjelaskan tentang bagaimana kebijakan diplomasi pertahanan maritim sebagai strategi kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan sektor maritim Indonesia terutama yang berada di perbatasan. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan menggunakan strategi kebijakan diplomasi pertahanan maritim masih belum maksimal dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, kerjasama bilateral dan multilateral tidak dilakukan dengan negara yang terlibat konflik secara langsung dengan Indonesia. *Kedua*, belum adanya koordinasi antar pemerintah atau instansi terkait dalam penerapan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Selain itu, Adikara dan Munandar (2021) juga menyebutkan dalam penerapan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam penanganan sengketa di Laut Natuna Utara. Penulis menemukan tiga tantangan yang ada dalam penerapan kebijakan tersebut. *Pertama*, Indonesia memerlukan *leading sector* yang konsisten dalam pemerintahan yang bertanggungjawab secara jelas mengatur kebijakan diplomasi pertahanan maritim. *Kedua*, perluasan cakupan kerjasama bilateral dan multilateral dalam diplomasi pertahanan maritim. *Ketiga*, ketidakpercayaan dan penentangan Tiongkok dalam aturan hukum internasional UNCLOS 1982 dengan menerapkan klaim *nine dash line* (Adikara & Munandar, 2021).

Santoso (2020) menguraikan dalam artikelnya bahwa konflik Laut China Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara China dan beberapa negara anggota ASEAN memiliki dampak bagi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Menurutnya, pada dasarnya Indonesia memiliki posisi yang kuat baik dengan memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup besar dalam mengatasi aksi China di ZEE Indonesia. Akan tetapi Indonesia hanya memiliki hak berdaulat saja atas ZEE tersebut sehingga perlu pengkajian yang tepat dalam strategi TNI. Santoso (2020) menjelaskan bahwasanya terdapat tiga strategi yang menurutnya tepat untuk dilakukan oleh TNI. Strategi umum bagi TNI untuk mengatasi aksi China tersebut dengan tetap mengedepankan aturan-aturan hukum, norma-norma dan nilai-nilai internasional yang berlaku, dan menjamin ketersediaan dukungan sumber daya nasional yang memadai jika mengalami eskalasi konflik serta mendorong penguatan diplomasi oleh K/L terkait sesuai fungsi. Selanjutnya yaitu, strategi operasional yang mana bagi TNI adalah menyusun *Roles of Engagement* yang mengimplementasikan hukum, norma-norma dan nilai-nilai internasional yang berlaku bagi setiap

Satgas tempur yang digelar. Disamping itu, secara khusus, mengedepankan bentuk-bentuk operasi OMSP yang bersifat tempur. Kemudian yang terakhir adalah strategi khusus yang dilakukan dengan memperbesar bentuk-bentuk OMSP TNI di ZEEI Laut Natuna Utara untuk memperkuat tugas Bakamla RI, mendorong perluasan kehadiran nelayan Indonesia, mendorong kerjasama multilateral dalam upaya *maritime security* di LCS (seperti Latma Navy Indo Pasifik) dan membangun upaya *integrated diplomacy* antar K/L terkait (Santoso, 2020).

Studi sebelumnya telah menggambarkan berbagai perpektif dalam melihat masalah keamanan yang terjadi di wilayah sengketa Laut Natuna Utara. Namun dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas memiliki keterbatasan dimana harus ditinjau lebih lanjut. Penelitian sebelumnya yang disebutkan diatas juga belum membahas secara detail kondisi kerjasama yang sudah cukup lama dan mengalami beberapa konflik namun tetap terjalin kerjasama yang erat, baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan menggunakan sudut pandang pemikiran liberal, tulisan ini membongkai alasan Indonesia meningkatkan kerjasama dengan China pasca terjadi sengketa di Laut Natuna Utara. Argumen utama dalam tulisan ini adalah dengan mekanisme kerjasama ekonomi antar negara akan menciptakan kepentingan keamanan bersama dan stabilitas di kawasan.

Interdependensi: sebuah kerangka konseptual

Kelompok liberal menekankan pentingnya dimensi ekonomi dari kerjasama antar negara dalam rangka mencapai kepentingan keamanan bersama dan, yang selanjutnya menciptakan sistem internasional yang lebih stabil. Kelompok ini melihat adanya penurunan kekuatan militer sebagai alat politik luar negeri seiring dengan keinginan negara-negara untuk meningkatkan interaksi perekonomian guna menciptakan dunia yang lebih sejahtera. Dalam pandangan liberal, negara-negara secara berkelanjutan membangun kerja sama ekonomi di segala tingkatan dalam sistem internasional, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar-negara karena keuntungan yang diperoleh dengan bekerja sama akan hilang jika terjadi konflik (Kurniawan, 2016). Singkat kata, ketergantungan ekonomi (interdependensi ekonomi) akan mengurangi konflik antar-negara.

Teori interdependensi digunakan untuk melihat kasus alasan mengapa Indonesia melakukan peningkatan kerjasama dengan China pasca klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara. Ketergantungan kepada satu sama lain sering kali merupakan istilah halus yang digunakan dalam berbagai cara yang saling bertentangan. Untuk dijadikan kerangka analisis dalam melihat suatu fenomena politik internasional, ketergantungan antarsesama merujuk pada situasi di mana aktor atau peristiwa di berbagai bagian sistem saling mempengaruhi. Menurut Nye (1997), terdapat empat

variabel yang menciptakan sebuah kondisi interdependensi atau ketergantungan. Empat variabel tersebut adalah, *sources of interdependence*, *benefits of interdependence*, *cost of interdependence*, dan *symmetric/asymmetric* (Nye, 1997).

Variabel pertama adalah *sources of interdependence* yang kemudian disebut dengan sumber interdependensi, yaitu sumber yang menjadi penyebab terciptanya saling bergantung satu sama lain oleh kedua pihak. Sumber tersebut memiliki dampak yang memberikan manfaat atau keuntungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam artikel Nye (1997) menyebutkan bahwa terdapat dua jenis yang menjadi sumber interdependensi yaitu aspek militer dan ekonomi (Nye, 1997). Sumber tersebut kemudian akan menimbulkan suatu rasa keinginan kebergantungan dengan pihak lainnya. Suatu ketergantungan tidak akan muncul apabila tidak ada sesuatu yang membuat kedua belah pihak ingin melakukan kerjasama.

Variabel kedua adalah *benefits of interdependence* yang kemudian disebut dengan manfaat interdependensi yang merupakan variabel yang digunakan untuk melihat keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Nye (1997) menjelaskan bahwa terdapat dua kondisi Ketika kedua belah pihak saling menginginkan adanya keuntungan, yaitu *zero-sum situations* dan *nonzero-sum situations*. *Zero-sum situations* menggambarkan sebuah kondisi dimana ketika kerugian suatu pihak dianggap sebagai keuntungan bagi pihak yang lainnya, pihak tersebut kemudian dianggap mendapatkan *relative gains*. Sedangkan *nonzero-sum situations* adalah kondisi dimana ketika kedua pihak sama-sama mengalami kerugian (*negative sum*) atau kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan (*positive sum*), dengan demikian kedua pihak disebut *absolute gains*. Nye berpendapat bahwa kondisi *positive sum situations* merupakan harapan bagi semua pihak dalam membentuk hubungan ketergantungan (Nye, 1997).

Variabel ketiga adalah *cost of interdependence* yang kemudian disebut dengan biaya interdependensi yang terdiri dari sensitivitas jangka pendek dan kerentanan jangka panjang. Nye dalam artikelnya menjelaskan sensitivitas jangka pendek yang dimaksud adalah seberapa besar dan cepat perubahan pengaruh yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan kerentanan jangka panjang adalah *relative cost* yang terjadi dalam suatu hubungan saling ketergantungan apabila terjadi perubahan pada kerjasama yang dibentuk atau biasa disebut tingkat kerentanan yang dimiliki oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya (Nye, 1997).

Variabel terakhir adalah *symmetric/asymmetric*, yang kemudian disebut dengan taraf keseimbangan hubungan. Variabel ini menganalisis tingkat kesetaraan dependensi yang terjadi di antara actor. Dalam kondisi hubungan saling ketergantungan ditemukan hubungan timbal balik antar

aktor. Namun ada kalanya satu aktor akan memiliki kecenderungan yang lebih dibandingkan aktor lainnya. Kondisi tersebut akan menimbulkan adanya pihak yang kurang bergantung dan pihak yang lain lebih bergantung. Pihak yang kurang bergantung cenderung memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan pihak yang lebih bergantung. Kondisi seperti ini dijabarkan oleh Nye (1997) sebagai kondisi asimetri (Nye, 1997).

Keempat variabel tersebut akan digunakan untuk menganalisis alasan mengapa Indonesia melakukan peningkatan kerjasama dengan China pasca peristiwa klaim sepihak China atas Laut Natuna Utara. Maka dari itu, dengan menggunakan teori interdependensi yang dikembangkan oleh Nye (1997) akan dilihat seberapa tinggi tingkat saling ketergantungan antara kedua belah pihak.

Hubungan Indonesia dan China pasca kasus sengketa Laut Natuna Utara

Indonesia dan China memiliki sejarah hubungan yang lama. Sejarah mencatat bahwa kedua negara memiliki kedekatan hubungan yang kerap diwarnai perdamaian dan konflik. Pada tahun 2009 konflik terjadi antar kedua negara setelah China menerbitkan peta versi mereka yang menyatakan bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayahnya. Meskipun Indonesia bukan merupakan *claimant state*, akan tetapi kalim China atas Laut China Selatan yang dikenal dengan *nine dash line* telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia yang bernama Laut Natuna Utara.

Meski terjadi sengketa wilayah di Laut Natuna Utara, menariknya Indonesia tetap melakukan hubungan kerjasama bahkan lebih meningkatkan. Pada Oktober 2013, China dan Indonesia telah mencapai kemitraan strategis komprehensif yang mana semula hanya kemitraan strategis biasa saja. Selanjutnya ditandatangani "Rencana Masa Depan Kemitraan Strategis Komprehensif China-Indonesia" (Antara News, 2013).

Hubungan kedua negara semakin meningkat setelah Presiden Joko Widodo resmi menjabat sebagai Presiden RI di tahun 2014. Hubungan kedua negara tampak erat terutama dalam hal ekonomi maupun investasi. Salah satu isu utama dalam hal ekonomi dan investasi yang menjadi fokus utama Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S. Priatna, menyampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa agenda pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019 diantaranya adalah pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km konstruksi jalan tol, 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, 30 waduk baru, 33 PLAT, 1 juta hektar jaringan irigasi (Astria, 2015). Hal ini merupakan agenda yang ambisius yang mana akan sulit tercapai apabila tanpa dukungan dana yang memadai.

Fokus utama Presiden Joko Widodo pada pembangun infrastruktur di Indonesia turut mendorong adanya kepentingan Indonesia untuk mendekat dengan China. Bagi Indonesia, China adalah negara yang memiliki nilai strategis sebagai negara mitra yang perlu selalu ditingkatkan dalam hubungan bilateral. Menurut Andika dan Aisyah (2017), terdapat dua faktor yang membuat Presiden Joko Widodo lebih condong ke China dalam hal ekonomi dan investasi. Pertama, faktor internal dimana pada masa awal jabatannya, Presiden Joko Widodo mencanangkan program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan finansial yang memadai. Indonesia membutuhkan investasi dan hal tersebut didapatkan dari China melalui *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Investasi tersebut didapatkan karena keikutsertaan Indonesia dalam proyek *One Belt One Road* yang sekarang dikenal dengan *Belt and Road Initiative* (BRI). Tentunya hal ini sangat menarik bagi Indonesia ataupun Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur yang terbilang ambisius (Andika & Aisyah, 2017).

Selain dari faktor internal yang cenderung terlihat kepragmatisan Joko Widodo, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan hubungan Indonesia dengan China. Munculnya fenomena *The Rising China* turut mempengaruhi kedekatan Indonesia dengan China. Kebangkitan China dalam hal ekonomi telah memperlihatkan bahwa China sebagai kekuatan ekonomi global. Selanjutnya dengan kebangkitan ekonomi China, di tahun 2013 China mengeluarkan kebijakan mega proyek *One Belt One Road* yang sekarang dikenal dengan *Belt and Road Initiative* (BRI). Inisiatif OBOR adalah rencana pembangunan dengan tujuan menghubungkan antar benua melalui jalur laut dan darat. Proyek konektivitas dari inisiatif ini akan membantu menyelaraskan dan mengkoordinasikan strategi pembangunan negara-negara di sepanjang *Belt and Road* (National Development and Reform Commission, 2015). Pada program OBOR tersebut Indonesia termasuk salah satu negara yang akan dilalui oleh jalur sutera yang hendak China bangun. Dengan ini terlihat bagaimana kedekatan Indonesia dengan China begitu juga sebaliknya China memiliki kepentingan dengan Indonesia (Andika & Aisyah, 2017).

Jika dilihat dari sisi ekonomi dan keamanan, sengketa Laut Natuna Utara merugikan bagi pihak Indonesia karena wilayahnya diklaim sepihak oleh China. Namun, alasan di balik kerjasama antara Indonesia dan China menjadi hal yang menarik dalam artikel ini. Dalam menjawab alasan tersebut, penulis akan menggunakan kerangka berpikir teori interdependensi dengan empat variabel oleh Nye (1997) yang sudah dibahas diatas. Keempat variabel tersebut yaitu, sumber, keuntungan, tingkat kerentanan, dan keseimbangan hubungan Indonesia dan China.

Faktor keamanan dan ekonomi

Dalam melihat bagaimana aspek keamanan dan ekonomi menjadi pembentuk hubungan saling ketergantungan antara Indonesia dan China perlu dilihat terlebih dahulu sejarah perjalanan hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara terbilang mengalami pasang surut hingga kemudian melakukan normalisasi hubungan di tahun 1990. Hubungan kedua negara semakin membaik pada puncaknya di tahun 2005. Kedua negara saling menandatangani kemitraan strategis sebagai bentuk kerjasama baik keamanan maupun ekonomi. Hal tersebut dikarenakan isi dari perjanjian kemitraan strategis tersebut berisi tentang kerjasama dalam teknologi pertahanan, dan perdagangan dan investasi (Sukma, 2009).

Kemitraan strategis yang ditandatangani oleh kedua negara menjadi wadah untuk melakukan kerjasama baik dari segi keamanan maupun ekonomi. Penandatanganan kerangka kemitraan strategis oleh Indonesia dan China tahun 2005 menjadi titik awal kerjasama pertahanan kedua negara. Hingga pada tahun 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada tahun 2007 di Beijing. Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia-China pada tahun 2007 (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Maka dengan adanya sejumlah forum kerjasama kedua negara ini memiliki tujuan untuk saling membangun sebuah kerjasama.

Dengan ditandatangani kerjasama pertahanan antara Indonesia-China tahun 2007, dari pihak Indonesia mengharapkan China untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri pertahanan di Indonesia. Implementasi dari pengembangan industri pertahanan tersebut adalah dengan *joint production* dan pelaksanaan *transfer of technology (ToT)*. Pengembangan industri pertahanan kemudian diharapkan terjadi sebuah peningkatan kapasitas dari persenjataan yang mampu meningkatkan kesempatan bagi China untuk menjaga kestabilan wilayah kawasan.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki wilayah perairan yang nilainya strategis. Di kawasan tersebut banyak akan kepentingan suatu negara baik dari negara kawasan itu sendiri maupun negara dari luar kawasan. Perkembangan lingkungan strategis menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan di wilayah perairan yang bersifat global, regional, dan nasional. Keamanan maritim sudah menjadi prioritas setiap negara, karena laut sangat penting bagi jalur perdagangan dan komunikasi serta sarana pertahanan dan keamanan. Indonesia dan China merupakan dua negara yang memiliki kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC (*Sea*

Lane of Communication atau ALKI), karena jalur tersebut dilalui untuk memenuhi pasokan energi dari dan ke Timur Tengah serta transportasi komoditas dan produk negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa (Sinaga, 2013). Perompakan menjadi masalah bersama bagi Indonesia dan China. Selat Malaka menjadi daerah perairan yang sering terjadi kasus perompakan. Pangestu (2019) menyebutkan bahwa 55 persen kasus pembajakan dan perompakan di dunia terjadi di perairan Selat Malaka (Pangestu, 2019). Maka dengan kondisi seperti ini, China perlu melakukan kerjasama dengan negara-negara yang berada di sekitar perairan Selat Malaka yaitu Indonesia. Dengan adanya kerjasama antara kedua negara tersebut dapat meningkatkan kapabilitas Indonesia dan China untuk menjaga kestabilan keamanan di wilayah perairan Asia Pasifik. Terlebih, tentang kapasitas geopolitik Indonesia dari aspek eksternal. Wilayah Indonesia yang luas menjadikannya sebagai salah satu negara yang memiliki kerentanan terhadap kejahatan transnasional seperti, *human trafficking*, *drug trafficking*, *maritime piracy*, dan terorisme.

Kerjasama kedua negara tersebut diperkuat dengan adanya potensi dalam mengembangkan sektor maritim Indonesia dengan visi poros maritim dunia dan Tiongkok dengan jalur sutera yang dicanangkan oleh presiden Xin Jinping. Kerjasama maritim Indonesia dan Tiongkok telah disepakati melalui penandatanganan nota kesepemahaman terkait pertahanan dan keamanan maritim melalui Komite Kerja sama Maritim (KKM). Bidang kerjasama tersebut meliputi keselamatan pelayaran yang dapat diimplementasikan dengan pertukaran informasi mengenai keselamatan pelayaran, menyediakan jasa penyelamatan pelayaran, dan dialog kerjasama yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk menunjang keamanan maritim, kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama untuk memerangi kejahatan di laut, seperti penyelundupan barang, peredaran narkoba, perdagangan orang, perompakan dan perampokan bersenjata, kejahatan terorganisasi lintas-batas negara lainnya dan tindakan melawan hukum di laut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2021).

Diantara negara-negara Asia, China berada di peringkat pertama dalam hal kekuatan militer. Di tingkat dunia China berada pada posisi ketiga diantara 142 negara hanya di bawah Amerika Serikat dan Rusia (Global Fire Power, 2022). Hal ini memperlihatkan dengan kapasitas kekuatan militer China mampu meningkatkan kesempatan kerjasama bagi Indonesia dalam mengamankan wilayah yang rentan akan ancaman transnasional. Dengan kesiapan 754 juta personil yang siap tempur dan alokasi pendanaan militer sebanyak 230 miliar Dollar Amerika menunjukkan bahwa China merupakan negara yang digdaya tidak hanya Asia saja melainkan dunia. Dengan

kedigdayaan ini diharapkan mampu meningkatkan kestabilan keamanan bagi Indonesia dan wilayah Asia Pasifik.

Lebih lanjut, China masa kini mejadi negara dengan kemajuan teknologi militer yang mumpuni. Alat teknologi terbaru adalah Zhu Hai Yun, sebuah kapal induk tanpa awak dan dioperasikan secara otonom untuk drone. Sebulan dalam pelayaran perdananya, kapal tersebut disebut sebagai kapal induk "cerdas" pertama China. Pada tahun 2017, para ilmuwan China mengembangkan bathyscaphe laut dalam dan jaringan pengamatan bawah laut untuk mengumpulkan data tentang laut terdalam di dunia. Sensor berbasis ruang angkasa yang seolah-olah untuk penelitian dapat melihat kapal selam musuh (Jennings, 2022).

Dengan demikian dapat terlihat pola hubungan interdependensi kedua negara. Baik Indonesia maupun China saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Indonesia dengan wilayah yang begitu luas memiliki kerentanan keancaman transnasional. Untuk menanggapi isu tersebut Indonesia membutuhkan persenjataan dengan kapasitas yang mumpuni dengan melakukan kerjasama dengan China yang merupakan rumah teknologi persenjataan untuk saat ini. Sedangkan dari pihak China juga membutuhkan kontribusi Indonesia untuk mengamankan wilayah Selat Malaka dari kasus pemabajakan dan perompakan yang merupakan jalur perdagangan China. Jika terjadi suatu gangguan dalam alur perdagangan tersebut maka dampaknya bagi China adalah kerugian hingga miliaran dollar karena keterlambatan pasokan logistik.

Selanjutnya pada sektor ekonomi telah membentuk hubungan interdependensi antara Indonesia dan China. Dalam melihat hubungan interdependensi antara Indonesia dan China dalam sektor ekonomi dapat dilihat dari wadah kerjasama antar kedua negara. Antara Indonesia dan China memiliki wadah kerjasama ekonomi yang dikenal dengan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA). ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China (Ditjen PPI, 2018). Indonesia telah menandatangani Ratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos*. Melalui perjanjian ACFTA tersebut, maka negara-negara ASEAN dapat memulai

pasar bebas di kawasan ASEAN-China. Selain menerapkan pasar bebas, hasil dari perjanjian ACFTA juga memberlakukan pembebasan bea masuk barang yang dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang. Maka dengan skema tersebut akan memberikan dampak pada kemajuan perekonomian kedua belah pihak.

Dalam kerangka ASEAN, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki peran penting dalam perwujudan implementasi ACFTA. Hal ini dilihat dari kapabilitas Indonesia pada sektor ekonomi yang disejajarkan dengan lima negara pendiri ASEAN. Lima negara tersebut merupakan negara yang dapat dikategorikan sebagai negara yang lebih maju di kawasan ASEAN. Negara-negara tersebut yaitu, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Indonesia bersama lima negara menjalankan perannya sebagai *role model* bagi negara-negara ASEAN yang lain untuk mengimplementasikan kesepakatan yang tertuang dalam ACFTA lebih dulu (Paramitha, 2014).

Faktor keamanan dan ekonomi telah membentuk suatu hubungan interdependensi antara Indonesia dan China. Terdapat beberapa kerjasama keamanan yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Kerjasama keamanan yang dibangun kedua negara baik sebelum dan sesudah konflik Laut Natuna Utara muncul menjadikan alasan untuk sampai saat ini mereka tetap melakukan kerjasama. Sebelum terjadinya konflik sengketa wilayah Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China sudah pernah melakukan sebuah penandatanganan *Defense Cooperation Agreement (DCA)* pada tahun 2007. Dengan adanya forum ini diharapkan untuk saling membangun sebuah kerjasama. Lebih lanjut, dengan adanya hubungan forum tersebut adalah harapannya Indonesia akan mendapat dukungan dalam sektor industri pertahanan. Berikutnya, hubungan kerjasama keamanan ini untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairan Asia Pasifik. Akan tetapi, jika dilihat dari bentuk ketergantungan yang telah dijabarkan di atas dapat terlihat bahwa Indonesia lebih membutuhkan China dalam bidang keamanan. Indonesia membutuhkan China dalam aspek industri pertahanan untuk menjaga perbatasan wilayah Indonesia yang memiliki kerentanan terhadap kejahatan transnasional.

Selanjutnya, pada sektor ekonomi, terdapat sebuah wadah yang digunakan untuk melakukan kerjasama, yaitu ACFTA. Hubungan interdependensi yang terbentuk berada pada sektor perdagangan baik melalui ekspor dan impor kedua negara. Dalam sebuah hubungan interdependensi tentu ada aspek keuntungan di dalamnya. Untuk memperjelas lebih dalam lagi terkait keuntungan yang didapat dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China pasca konflik Laut Natuna Utara, peneliti akan menjelaskan pada subbab berikutnya.

Keuntungan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China

Keuntungan dalam hubungan interdependensi antara Indonesia dan China yang pertama adalah dalam bidang keamanan. Alasan Indonesia tetap memilih untuk menjalankan kerjasama yaitu dapat dilihat dari bagaimana hubungan kerjasama keamanan yang sudah dibangun sebelum konflik Laut Natuna Utara dan setelah adanya peristiwa tersebut. Kedua negara sebenarnya sudah memulai kerjasama pertahanan yang berlangsung cukup lama, sejak tahun 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta kemudian dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada tahun 2007 di Beijing. Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara Indonesia-China pada tahun 2007 (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Dengan adanya wadah kerjasama, keuntungan tersebut terlihat dalam hal industri pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan alat persenjataan Indonesia guna mengamankan wilayah yang rentan akan kejahatan transnasional. Semenjak dilakukan penandatanganan DCA di tahun 2007, hingga tahun 2012 banyak kemajuan dalam hubungan kerjasama pertahanan yang dilakukan kedua negara terutama dalam hal pertukaran pendidikan, pelatihan maupun dalam pengadaan Alutsista. Khusus mengenai kerjasama di bidang industri pertahanan, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kemhan RI dengan *State Administration for Science, technology and Industry for National Defence SASTIND* pada tanggal 22 Maret 2011 yang lalu di Jakarta. Penandatanganan MoU bidang industri pertahanan dan LoI yang menyertainya, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama bidang pengadaan Alutsista khususnya, maupun kerjasama bidang logistik secara umum (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Lebih lanjut, semenjak adanya DCA diantara kedua negara ini, China mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia. Setidaknya terdapat tiga aset yang dimiliki China yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Aset tersebut diantaranya seperti, posisi China sebagai negara 3 besar dunia dengan kapabilitas militer, industri pertahanan, dan pelatihan militer. Sejak pertama kali ditandatangani DCA hingga tahun 2012 hasil forum kerjasama pertahanan tersebut telah mencapai beberapa kesepakatan. Dari segi pelatihan militer, Indonesia dan China berkesempatan untuk menggelar Latihan bersama pasukan khusus. Dari pihak Indonesia mengikutsertakan Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Candra, 2013).

Selanjutnya dalam hal industri pertahanan, menurut pemerintah Indonesia China bersedia bekerja sama dalam hal alih teknologi sejumlah alat utama sistem persenjataan (Candra, 2013). Salah satu contoh kerjasama

antara Indonesia dan China adalah dalam hal alih teknologi yaitu pembuatan Rudal C-705. Kerjasama ini dapat memenuhi tujuan pemerintah Indonesia dalam membangun postur pertahanan yang esensial yang direncanakan dari tahun 2005-2024. Dengan kesepakatan kerjasama dalam hal transfer teknologi Indonesia mendapat keuntungan dari bagaimana cara membuat sebuah rudal. Sehingga kedepannya Indonesia dapat menciptakan rudal secara mandiri. Rudal memiliki nilai strategis bagi pertahanan. Rudal merupakan variable untuk perkembangan dan pertumbuhan suatu perusahaan karena tidak semua perusahaan dapat membuat rudal. Selain itu kerjasama tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan kompetensi dalam pasar internasional dengan standar yang ditentukan oleh internasional. Terakhir, yang paling utama adalah dengan adanya pembuatan rudal maka dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional (Wulandari, 2015).

Berikutnya dari DCA China mampu memberi keuntungan berupa pusat pelatihan Bahasa Mandarin. Indonesia mendapat keuntungan dengan kesepakatan bahwa China akan membangun labotarium Bahasa Mandarin untuk Pusat Bahasa Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kementerian Pertahanan RI. Laboratorium ini digunakan untuk meningkatkan kemahiran Bahasa Mandarin para perwira TNI (Hafil, 2014). Manfaat dari kerjasama ini yakni memudahkan interaksi bagi perwira TNI dengan tentara China ketika mengadakan pertukaran militer untuk meningkatkan kemampuan personil TNI. Sehingga apabila latihan gabungan tersebut efektif, maka akan menjamin keamanan dan pertahanan antar negara tersebut jauh lebih efektif.

Dari beberapa kerjasama keamanan dan pertahanan antar kedua negara dapat terlihat manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dan China. Indonesia dalam bidang keamanan dan pertahanan, yaitu mendapat keuntungan dari kekuatan militer China. Keuntungan dari kekuatan militer China memberikan banyak bantuan berupa operasi militer maupun latihan bersama untuk meningkatkan kapabilitas militer Indonesia. Selain itu dengan kemampuan militer China yang kuat dan memiliki teknologi persenjataan terbaru menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan postur pertahanan Indonesia. Di sisi lain, China mendapat keuntungan berupa jaminan keamanan sementara secara normatif dari Indonesia di kawasan Selat Malaka dengan beberapa bantuan yang diberikannya. Selat Malaka merupakan jalur niaga terpadat di dunia dengan negara pengguna intensif seperti Australia, Tiongkok, Jerman, India, Jepang, Norwegia, Panama, Korea Selatan, Inggris, dan tentunya, Amerika Serikat (Nahaba, 2012). Bagi China, 80% impor minyaknya melewati jalur Selat Malaka. Seperti yang kita ketahui bahwa industrialisasi di China berlangsung sangat cepat. Maka China membutuhkan pasokan energi

minyak agar perputaran roda industrinya terus berjalan. Keadaan ini tak pelak lagi telah membawa Selat Malaka kepada posisi dilematis China (Kusmanto, 2019).

Selanjutnya keuntungan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China pada aspek ekonomi. Keuntungan tersebut dapat dilihat pada wadah ACFTA. Dengan adanya ACFTA, secara signifikan terlihat bahwa perdagangan antara Indonesia dan China meningkat dari tahun ke tahun. Untuk melihat peningkatan tersebut maka dibawah akan disajikan data perdagangan Indonesia dengan China sebelum dan sesudah terbentuknya ACFTA.

Tabel 1. Nilai Ekspor Indonesia ke China (dalam USD) dan Nilai Impor Indonesia dari China periode tahun 2000-2004

TAHUN	NILAI EXPORT	PERTUMBUHAN EKSPOR (%)	NILAI IMPORT	PERTUMBUHAN IMPOR (%)
2000	2,767,707,562.00		2,021,971,014.00	
2001	2,200,670,391.00	-20	1,842,680,215.00	-9
2002	2,902,947,738.00	32	2,427,368,631.00	32
2003	3,802,530,088.00	31	2,957,468,648.00	22
2004	4,604,733,109.00	21	4,101,331,096.00	39

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia dengan China periode tahun 2006-2010

	2006	2007	2008	2009	2010	Trend (%)
Total trade	14.9	18.2	26.8	25.5	36.1	23.31
Oil and gas	4.0	3.6	4.1	3.0	2.3	-11.55
Non-oil and gas	10.9	14.6	22.7	22.4	33.7	30.68
Exports	8.3	9.6	11.6	11.4	15.6	15.44
Oil and gas	2.8	3.0	3.8	2.5	1.6	-12.31
Non-oil and gas	5.4	6.6	7.7	8.9	14.0	24.41
Imports	6.6	8.5	15.2	14.0	20.4	31.53
Oil and gas	1.1	6.0	0.299	0.510	0.736	-9.77
Non-oil and gas	5.5	7.9	14.9	13.4	19.6	36.04
Indonesia's trade balance with China	1.7	1.1	-3.6	-2.5	-4.7	0.00
Oil and gas	1.7	2.4	3.5	2.0	0.875	-14.18
Non-oil and gas	-0.01	-1.2	-7.1	-4.5	-5.6	-0.00

Sumber: diolah oleh Kementerian Perdagangan RI dalam Alexander C. Chandra dan Lucky Lontoh (2011).

Tabel 3. Neraca Perdagangan Indonesia dengan China periode tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Trend (%) 17-21	Jan-Jul		Perub. (%) 22/21
							2021	2022	
TOTAL PERDAGANGAN	58,849,923.5	72,670,066.4	72,892,507.8	71,416,536.0	109,992,710.2	13.13	56,731,561.9	72,388,636.4	27.60
MIGAS	1,988,450.7	3,010,871.0	2,397,210.6	2,126,777.0	3,169,562.0	6.02	1,666,828.6	1,448,945.1	-13.07
NON MIGAS	56,861,472.8	69,659,195.3	70,495,297.2	69,289,759.0	106,823,148.2	13.38	55,064,733.3	70,939,691.3	28.83
EKSPOR	23,083,091.2	27,132,234.1	27,961,887.1	31,781,826.0	53,765,501.1	20.31	26,644,561.6	34,124,188.6	28.07
MIGAS	1,733,417.2	2,724,143.7	2,067,543.8	1,845,383.9	2,676,582.0	4.91	1,305,668.5	1,205,030.5	-7.71
NON MIGAS	21,349,674.0	24,408,090.4	25,894,343.3	29,936,442.1	51,088,919.1	21.52	25,338,893.1	32,919,158.2	29.92
IMPOR	35,766,832.3	45,537,832.3	44,930,620.7	39,634,710.0	56,227,209.1	7.96	30,087,000.3	38,264,447.8	27.18
MIGAS	255,033.6	286,727.4	329,666.8	281,393.1	492,980.0	13.88	361,160.1	243,914.6	-32.46
NON MIGAS	35,511,798.8	45,251,104.9	44,600,953.9	39,353,316.8	55,734,229.1	7.92	29,725,840.2	38,020,533.2	27.90
NERACA PERDAGANGAN	-12,683,741.1	-18,405,598.2	-16,968,733.6	-7,852,884.0	-2,461,708.0	33.84	-3,442,438.8	-4,140,259.2	-20.27
MIGAS	1,478,383.6	2,437,416.3	1,737,877.1	1,563,990.7	2,183,602.0	3.42	944,508.4	961,115.9	1.76
NON MIGAS	-14,162,124.8	-20,843,014.5	-18,706,610.6	-9,416,874.7	-4,645,310.0	26.10	-4,386,947.2	-5,101,375.0	-16.29

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Dari ketiga tabel yang dipaparkan diatas menunjukkan bagaimana perdagangan Indonesia dengan China sebelum dan sesudah adanya ACFTA. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada periode 2000-2004 (periode sebelum berlakunya ACFTA), pertumbuhan ekspor Indonesia ke China per tahun jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari China per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penetrasi produk China ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan penetrasi produk Indonesia ke pasar China. Namun perbedaan mulai terlihat setelah kesepakatan ACFTA mulai berlaku. Perdagangan Indonesia dengan China relatif lebih meningkat signifikan dari periode sebelum kesepakatan ACFTA berlaku. Pada tahun 2004, sebelum diimplementasikannya ACFTA, total perdagangan Indonesia dan China bernilai 8,7 juta USD. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 14,9 juta USD pada tahun 2006, setahun setelah diimplementasikannya ACFTA 2005. Sejak diterapkan kesepakatan ACFTA, menurut data yang dipaparkan dalam tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa ekspor Indonesia secara signifikan meningkat. Namun tidak dapat dipungkiri Indonesia juga mengalami defisit dikarenakan nilai impor lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Peningkatan yang terjadi di sektor ekspor secara signifikan mengindikasikan bahwa Indonesia mendapatkan akses pasar dari China menjadi semakin terbuka. Batasan-batasan perdagangan yang berupa pengurangan tarif berdampak pada komoditas Indonesia yang dapat memudahkan untuk menembus dan bersaing dengan komoditas China di pasar lokal. Di samping itu, kenaikan sebesar hampir 4x lipat dalam kurun waktu yang relatif singkat menunjukkan bahwa adanya keuntungan dari implementasi tahapan awal ACFTA, walaupun masih berupa perdagangan sektor pertanian dan perkebunan akan tetapi berdampak cukup besar bagi Indonesia (Paramitha, 2014).

Dengan adanya ACFTA kedua negara mendapat kemudahan dalam mendistribusikan aliran barang dari Indonesia ke China dan sebaliknya. Indonesia membutuhkan impor barang non-migas dari China. Sedangkan China membutuhkan impor migas dan non-migas dari Indonesia. Melihat presentase dari data yang dipaparkan, pada sektor ekonomi China terlihat lebih membutuhkan Indonesia dengan pasokan energinya dan dari segi penetrasi ke pasar Indonesia. Dari kedua faktor tersebut maka memperlihatkan bahwa terjadi sebuah hubungan interdependensi antara Indonesia dan China.

Tingkat kerentanan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China

Tingkat kerentanan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China dalam aspek keamanan dapat dilihat dari persepsi ancaman oleh kedua negara. China memiliki ancaman terhadap wilayah perairan di sekitar Indonesia yang merupakan jalur perdagangan China. Hampir seluruh kegiatan perdagangan China melewati jalur tersebut. Dikatakan terdapat ancaman di wilayah itu dikarenakan sering terjadi kejahatan transnasional seperti pembajakan/perompakan dan terorisme. Sehingga hal ini akan menjadi kerentanan dan berimbas pada kestabilan wilayah perairan. Penulis memiliki pendapat bahwa biaya yang diberikan memiliki vulnerabilitas yang rentan dan sensitivitas yang lebih besar pada China dibandingkan dengan Indonesia. Selanjutnya penulis berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi geostrategis yang lebih tinggi daripada China dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah perairan yang digunakan sebagai jalur perdagangan China. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hampir seluruh perdagangan internasional China melewati perairan Indonesia.

Letak geografis Indonesia memiliki potensi yang lebih dibandingkan dengan China. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis dalam kerangka pengaturan keamanan di wilayah perairan Asia Tenggara. Indonesia memiliki modalitas sebagai negara kepulauan yang memiliki peran penting dan signifikan dalam mengamankan perairan Asia Tenggara. Wilayah perairan Indonesia menjadi jalur strategis bagi perdagangan internasional. Dalam hal ini perdagangan internasional merupakan aspek terpenting sebagai mata rantai yang tidak boleh terputus disebabkan oleh suatu ancaman dan gangguan apapun. Letak Indonesia yang berada di jalur persimpangan antara kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia memiliki posisi yang strategis, sehingga membuat Indonesia menjadi aktor yang paling signifikan pada isu keamanan maritim.

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dalam melakukan pengamanan di wilayah perairan Asia Tenggara. Di masa mendatang tidak

menutup kemungkinan bagi Indonesia akan semakin memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengaturan keamanan di wilayah perairan Asia Tenggara. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana upaya Indonesia dalam menangani perompakan di Selat Malaka. Perhatian Indonesia terhadap kasus perompakan yang terjadi di wilayah Selat Malaka sudah berjalan dari tahun 1992. Upaya dalam negeri dilakukan Indonesia dengan membentuk sebuah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang sekarang dikenal dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI). Perhatian lebih ditunjukkan Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan negara yang berada sekitar Selat Malaka, yaitu Malaysia dan Singapura untuk menangani perompakan bersama. Di tahun yang sama, Indonesia melakukan kerjasama dengan Singapura yang bertajuk Indonesia-Singapura *Coordinated Patrols* untuk mengatur keamanan di wilayah Selat Malaka dan Singapura. Selanjutnya di tahun 2004 Indonesia meningkatkan kerjasama dengan Malaysia dan Singapura. Kerjasama tersebut dikenal dengan sebutan MALSINDO. Pembentukan MALSINDO merupakan manifestasi dari penguatan kerjasama ketiga negara untuk memerangi kasus perompakan di Selat Malaka.

Untuk meninjau bagaimana tingkat vulnerabilitas dan sensitivitas dari hubungan militer antara Indonesia dan China setidaknya terdapat dua skenario yang perlu menjadi pertimbangan. Pertimbangannya adalah ketika Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan China dan skenario apabila Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan China.

Skenario pertama, yaitu apabila Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan China. Jika hubungan kerjasama kedua negara tetap terjalin maka pola saling ketergantungan antara Indonesia dan China akan tetap dipertahankan. Indonesia mendapatkan keuntungan dari China dengan kemajuan teknologi persenjataannya. Sedangkan dari sisi China akan mendapatkan bantuan jaminan keamanan sementara di wilayah perairan yang menjadi jalur perdagangan internasional.

Berikutnya skenario kedua yang dihadapi apabila Indonesia memutuskan tidak memilih untuk melakukan kerjasama dengan China. Hal ini akan terlihat ketika aktivitas perdagangan internasional China terhambat pada jalur perdagangan dan mendapat ancaman di daerah perairan sekitar wilayah Indonesia. Melihat posisi Indonesia yang berada pada jalur silang antara kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia tentunya memiliki peran yang strategis dalam isu pengamanan wilayah. Sementara itu apabila, Indonesia memutuskan untuk tidak bekerjasama, Indonesia hanya akan kehilangan kedekatannya dengan China dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan peluang kerjasama pertahanan untuk mendukung keamanan wilayah perairan Indonesia yang rawan kejahatan. Indonesia masih

memiliki kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara barat untuk meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia. Interdependensi akan keamanan dan ekonomi dunia menempatkan Indonesia pada posisi yang unik. Hampir seluruh jalur perdagangan dunia melalui perairan wilayah Indonesia. Maka hal ini menjadi posisi yang strategis bagi Indonesia yang bisa dimanfaatkan seefektif mungkin.

Keseimbangan hubungan interdependensi antara Indonesia dan China

Keseimbangan yang terbentuk oleh kedua negara dapat dikatakan tidak seimbang dan cenderung menguntungkan China dibandingkan Indonesia. Meskipun terjadi sebuah kondisi ketidakseimbangan, namun bagi kedua belah pihak masih mendapatkan keuntungan dari keputusan untuk menjalankan kerjasama. Dalam kerjasama tersebut masih terdapat suatu hubungan saling bergantung terhadap aspek-aspek yang ada dalam kerjasama tersebut.

Dalam aspek militer maupun keamanan, Indonesia dan China memiliki tingkat keseimbangan yang tidak simetris. Berdasarkan penjelasan pada subbab sebelumnya yang menjelaskan bahwa China memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Keamanan dan stabilitas wilayah perairan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan dan sebagai jalur pasokan energi China sangat diperlukan untuk menjamin perputaran roda industri dalam negeri. Sementara itu, wilayah perairan Selat Malaka merupakan wilayah perairan di Asia Tenggara yang paling rawan terjadinya pembajakan dan perompakan laut. Kondisi ini tentunya akan memberi ancaman bagi China di sektor keamanan pasokan energi. China merupakan negara pengguna terbesar wilayah tersebut karena pasokan energi China dari negara-negara Timur Tengah seluruhnya melewati Selat Malaka. Indonesia sebagai negara pesisir Selat Malaka telah memberikan banyak kontribusi keamanan dalam penanganan kasus pembajakan dan perompakan laut. Indonesia bersama negara pesisir lainnya, Malaysia dan Singapura bekerjasama untuk melakukan patroli laut yang hasilnya sejak tahun 2005 kerjasama terbentuk menunjukkan tren positif bahwa setiap tahun kasus pembajakan semakin berkurang. Apabila Indonesia dan China tidak membentuk sebuah kerjasama, maka dampaknya suatu kemungkinan apabila kasus pembajakan akan meningkat kembali. Kemudian akan menimbulkan ancaman bagi keamanan pasokan energi bagi China. Maka dari itu, tingkat keseimbangan keamanan Indonesia memiliki nilai tawar yang lebih dibandingkan dengan China.

Selanjutnya adalah pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi antara Indonesia dan China juga memiliki tingkat keseimbangan yang tidak simetris. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, Indonesia lebih memiliki kerentanan dibandingkan dengan China. Kemungkinan

kehilangan kesempatan yang akan muncul apabila Indonesia dan China tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik maka akan menimbulkan resiko yang besar. Mengingat bahwa negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah China. Hingga tahun 2022 China masih menjadi negara tujuan ekspor bagi Indonesia. Namun bagi China hal ini tidak terlalu memberikan dampak yang begitu signifikan. Indonesia bukan menjadi negara importir yang utama untuk memasok barang kebutuhan dalam negeri China. Oleh karena itu, tingkat keseimbangan dalam hal ekonomi cenderung menguntungkan China dibandingkan Indonesia.

Dari penjelasan diatas, dapat terlihat bahwa keseimbangan dari hubungan interdependensi antara Indonesia dan China bergantung pada sektor yang dikerjasamakan. Dalam sektor keamanan, Indonesia cenderung memiliki nilai tawar yang lebih tinggi daripada China. Sebaliknya, pada sektor ekonomi China cenderung lebih unggul daripada Indonesia.

Kesimpulan

Tahun 2009 menjadi awal mula munculnya permasalahan antara Indonesia dan China. Permasalahan terjadi disebabkan oleh klaim sepihak China atas Laut China Selatan yang memasukan wilayah perairan Indonesia dalam peta negara China. Pada peta terbaru yang diterbitkan oleh China didalamnya terdapat wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan peristiwa ini Indonesia berada di posisi yang sangat dirugikan mengingat bahwa wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Alih-alih untuk menyerang balik atas apa yang dilakukan China, Indonesia justru lebih memilih meningkatkan kerjasama dengan China.

Pada Oktober 2013, China dan Indonesia mencapai kemitraan strategis komprehensif dan telah ditandatangani "Rencana Masa Depan Kemitraan Strategis Komprehensif Tiongkok-Indonesia". Jika dilihat dari sisi ekonomi dan keamanan, sengketa Laut Natuna Utara merugikan bagi pihak Indonesia karena wilayahnya diklaim sepihak oleh China. Menurut argumen penulis dengan melakukan kerjasama akan menimbulkan sebuah keuntungan daripada menanggung biaya yang lebih tinggi ketika muncul sebuah konflik.

Faktor sejarah antara kedua negara yang memiliki hubungan kerjasama membuat Indonesia lebih melakukan kerjasama. Kedua negara memiliki sejarah saling menandatangani kemitraan strategis sebagai bentuk kerjasama baik keamanan maupun ekonomi. Faktor keamanan dan ekonomi telah membentuk suatu hubungan interdependensi antara Indonesia dan China. Terdapat beberapa kerjasama keamanan yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut. Kerjasama keamanan yang dibangun kedua negara baik sebelum dan sesudah konflik Laut Natuna Utara muncul menjadikan alasan untuk sampai saat ini mereka tetap melakukan

kerjasama. Selanjutnya, pada sektor ekonomi, terdapat sebuah wadah yang digunakan untuk melakukan kerjasama, yaitu ACFTA. Hubungan interdependensi yang terbentuk berada pada sektor perdagangan baik melalui ekspor dan impor kedua negara.

Kerjasama kedua negara telah memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Dengan adanya wadah kerjasama, keuntungan didapatkan Indonesia dalam hal industri pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan alat persenjataan Indonesia guna mengamankan wilayah yang rentan akan kejahatan transnasional. Semenjak dilakukan penandatanganan DCA di tahun 2007, hingga tahun 2012 banyak kemajuan dalam hubungan kerjasama pertahanan yang dilakukan kedua negara terutama dalam hal pertukaran pendidikan, pelatihan maupun dalam pengadaan Alutsista. Selanjutnya dari aspek ekonomi, keuntungan tersebut dapat dilihat pada wadah ACFTA. Dengan adanya ACFTA, secara signifikan terlihat bahwa perdagangan antara Indonesia dan China meningkat dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, melalui kerjasama antar negara dapat mencapai kepentingan keamanan bersama. Selanjutnya negara-negara akan membangun kerjasama di segala tingkatan dalam sistem internasional dengan tujuannya untuk mengurangi munculnya suatu konflik antar negara dikarenakan keuntungan yang didapat dari hasil kerjasama akan hilang apabila terjadi eskalasi sebuah konflik. Dengan kata lain, bahwa sebuah hubungan interdependensi antar negara akan mengurangi konflik antar negara.

Daftar pustaka

- Adikara, A. P. B. & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, pp. 83-101.
- Andika, M. T. & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, pp. 161-179.
- Antara News (2013) Indonesia, China forge comprehensive strategic partnership in various field [Online], 7 October. Available at: <<https://en.antaranews.com/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>> [accessed on 6 June 2023].
- Astriana, F. (2015). Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla: Evaluasi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi. *THC Review*, pp. 23-40.

- Candra, K. (2013) Indonesia dan Cina Bahas Kerja Sama Pertahanan [Online], Tempo Nasional. Available at: <<https://nasional.tempo.co/read/537906/indonesia-dan-cina-bahas-kerja-sama-pertahanan>> [accessed on 24 September 2022].
- Chubb, A. (2014) China's expansion of "Regular Rights Defense Patrols" in the South China Sea [Online], South Sea Conversations. Available at: <<https://southseaconversations.wordpress.com/2014/09/04/chinas-expansion-of-regular-rights-defense-patrols-in-the-south-china-sea-a-map-courtesy-of-cctv/>> [accessed on 8 September 2022].
- Chwee, K. C. (2017) Explaining the Contradiction in China's South China Sea Policy: Structural Drivers and Domestic Imperatives. *China: An International Journal*, pp. 163-186.
- Darmawan, A. B. & Ndadari, G. L. (2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *Jurnal Hubungan Internasional*, pp. 1-15.
- Deni, F. & Sahri, L. (2017). Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna. *International & Diplomacy*, pp. 1-22.
- Ditjen PPI. (2018). ASEAN-China [Online] Available at: <<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>> [accessed on 19 September 2022].
- Fravel, M. T. (2011). China's Strategy in the South China Sea. *Contemporary Southeast Asia*, pp. 292-319.
- Global Fire Power (2022) 2022 Military Strength Ranking [Online]. Available at: <<https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>> [accessed on 19 September 2022].
- Hafil, M. (2014) Cina Bantu Laboratorium Bahasa Mandarin [Online], Republika. Available at: <<https://www.republika.co.id/berita/nce38c5/cina-bantu-laboratorium-bahasa-mandarin>> [accessed on 25 September 2022].
- Jennings, R. (2022) China Claims New Technical Tool; Analysts Suspect Dual Military Use [Online], VOA News. Available at: <<https://www.voanews.com/a/china-claims-new-technical-tool-analysts-suspect-dual-military-use/6620397.html#:~:text=China%20is%20showing%20off%20new,first>>

%20%22intelligent%22%20drone%20carrier.> [accessed on 19 September 2022].

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2021) Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Penguatan Kerjasama Maritim [Online], Available at: <<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=CHN-2021-0234.pdf>> [accessed on 13 June 2023].

Kementerian Pertahanan RI. (2012) Menhan RI Lakukan Kunjungan ke China [Online], 5 November. Available at: <<https://www.kemhan.go.id/2012/05/11/menhan-ri-lakukan-kunjungan-ke-china-2.html>> [accessed on 9 September 2022].

Kurniawan, Y. (2016). One Belt One Road (OBOR): Agenda Keamanan Liberal Tiongkok?. *Politica*, pp. 233-254.

Kusmanto, W. H., 2019. *Strategi Cina Menghadapi "Malacca Dilemma" dalam Rangka Pengamanan Jalur Energi Cina di Selat Malaka*. Thesis, Universitas Sumatera Utara.

Meyer , P. K., Nurmandi, A. & Agustiyara, A. (2019). Indonesia's swift securitization of the Natuna Islands how Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*, pp. 70-87.

Muas, R. T. N. E. (2012). *Normalisasi Hubungan Diplomatik Cina-Indonesia dan Peran Konsep Mianzi*. Disertasi, Universitas Indonesia .

Muhaimin, R. (2018) . Kebijakan Sekuritisasi dan Persepsi Ancaman di Laut Natuna Utara. *Politica*, pp. 17-37.

Nahaba, B. (2012) Indonesia dan Tiongkok Jajaki Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka [Online], VOA Indonesia. Available at: <<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-dan-tiongkok-jajaki-kerja-sama-pengamanan-selat-malaka/1365292.html>> [accessed on 25 September 2022].

National Development and Reform Commission. (2015) Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road [Online], Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Available at:

<https://www.fmprc.gov.cn/eng/topics_665678/2015zt/xjpcxbayzlt2015nnh/201503/t20150328_705553.html> [accessed on 6 June 2023].

- Nye, J. S. (1997). *Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History*. New York: Longman.
- Pangestu, M. R. (2019). Ketidakefektifan Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi Pembajakan dan Perompakandi Selat Malaka dan Singapura. *Journal of International Relations*, 5, pp. 967-978.
- Paramitha, S. H. (2014). *Analisis Keterlibatan Negara dalam Kerjasama Regional: Studi Kasus Indonesia dalam ASEAN-China Free Trade Area Periode 2002-2012*. Undergraduate Thesis, Universitas Indonesia.
- Poespojoedho, R. (2019). Naval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, pp. 245-264.
- Ruyat, Y. (2017). Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, pp. 67-75.
- Santoso, T. I. (2020). Aksi Agresivitas Cina pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, pp. 35-46.
- Sinaga, L. C. (2013). *Hubungan Indonesia-China dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara: Perspektif Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Sukma, R. (2009). Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement. *Asian Survey*, pp. 591-608.
- Utomo, H., Prihantoro, M. & Adriana, L. (2017). Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, pp. 63-88.
- Wulandari, A. F. (2015). Kerjasama Indonesia-China: Transfer Teknologi di Bidang Industri Pertahanan (Study Kasus Pembuatan Rudal C-705). *Transformasi*, 2, pp. 89-219.